

**KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENSOSIALISASIKAN WAWASAN
KEBANGSAAN DI SULAWESI UTARA**

**(STUDI KASUS DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SULAWESI UTARA)**

***PERFORMANCE OF LOCAL GOVERNMENTS IN SOCIALIZING NATIONAL INSIGHTS
IN NORTH SULAWESI
(CASE STUDY IN THE NATIONAL UNITY AND POLITICAL AGENCY OF
NORTH SULAWESI PROVINCE)***

Jegiftha V. P. P Lumettu⁽¹⁾, Agustinus B. Pati⁽²⁾, Johny P Lengkong⁽²⁾

1) Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi, Manado

2) Staf Pengajar dan Peneliti pada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi, Manado

*Penulis untuk korespondensi: githapratami@gmail.com

Naskah diterima melalui Website Jurnal Ilmiah agrisosioekonomi@unsrat.ac.id : Selasa, 16 November 2021
Disetujui diterbitkan : Minggu, 28 November 2021

ABSTRACT

This research aims to find out why the performance of the local government in socializing the national insight is not yet optimal. This research used descriptive qualitative research methods to provide a clear picture of a phenomenon or social reality relating to the problem under study. The results of this research shows that the process of implementing the socialization of national insight has been going well, but after being affected by the Covid-19 outbreak, “Kesbangpolda” experienced budget problems, because the budget that should have been used for the socialization was shifted to handling Covid-19, hence “Kesbangpolda” could conduct only 3 activities of the 20 annual activities, and even then it is only done online which is considered ineffective to increase understanding of national insight. Thus, it is concluded that the performance of the National Unity and Political Agency of North Sulawesi Province is poor, because it only carried out 3 activities throughout 2020. For this reason, it is recommended that the North Sulawesi Provincial Political and National Unity Agency innovate the implementation of its socialization.

Keywords: local government; performance; national insight

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa kinerja pemerintah daerah dalam mensosialisasikan wawasan kebangsaan di Sulawesi Utara belum maksimal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran yang jelas tentang suatu fenomena atau kenyataan sosial yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan sosialisasi wawasan kebangsaan telah berjalan lancar, namun setelah terdampak wabah covid-19, pihak kesbangpolda mengalami masalah anggaran, karena anggaran yang seharusnya dipakai untuk melaksanakan sosialisasi digeser untuk penanganan covid-19, sehingga Kesbangpolda hanya dapat melaksanakan 3 kegiatan dari 20 kegiatan yang biasanya dilaksanakan tiap tahun, itupun hanya dilakukan secara daring (online) yang dinilai tidak efektif untuk meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan, sehingga disimpulkan bahwa kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi buruk, karena hanya melakukan 3 kegiatan sepanjang tahun 2020. Untuk itu disarankan agar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara berinovasi dalam pelaksanaan sosialisasinya.

Kata Kunci : kinerja; pemerintah daerah; wawasan kebangsaan

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sebagai satu bangsa, Indonesia memiliki sejarah yang sangat panjang, sejak perjuangan dan pergerakan Nasional Pra kemerdekaan dari Abad ke 19, era kebangkitan nasional tahun 1908 yang di pelopori oleh Dr. Soetomo sampai pada masa pergerakan Sumpah Pemuda tahun 1928 dimana para pemuda mengikrarkan Sumpah Pemuda, sumpah persatuan yaitu bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu yaitu Indonesia hingga dapat mencapai kemerdekaan tahun 1945. Ke tiga peristiwa ini merupakan tonggak awal sekaligus wujud nyata rasa persatuan dan kesatuan yang telah mengantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Namun tidak dapat di pungkiri hingga saat ini masih sering terjadi konflik di daerah-daerah baik konflik agama maupun kesukuan, hal ini terindikasi di akibatkan oleh melemahnya pemahaman akan wawasan kebangsaan masyarakat, terlebih khusus kaum muda yang sering menganggap bahwa pemahaman wawasan kebangsaan hanyalah hal kuno dan tak layak untuk di pelajari seiring meningkatnya kemajuan teknologi. Di Sulawesi Utara sebagai daerah yang rukun dan damai dengan slogan “torang samua basudara karena torang samua ciptaan Tuhan” masih saja terjadi gesekan yang melibatkan isu agama, suku dan ras. Dalam konteks suku, isu yang sering diangkat adalah Minahasa atau bukan Minahasa, sedangkan dalam konteks agama, isu yang paling tajam dan sering di mainkan adalah perbedaan denominasi agama, contohnya antara GMIM dan Pantekosta. Hal-hal ini menandakan pemahaman akan wawasan kebangsaan dari masyarakat Sulawesi Utara sudah mulai berkurang. Terkait dengan wawasan kebangsaan, hal ini harus menjadi perhatian serius dari kita semua sebagai elemen bangsa, terlebih khusus pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang adalah perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah untuk mensosialisasikan wawasan kebangsaan terhadap semua elemen Bangsa terlebih khusus generasi muda yang ada di Sulawesi Utara. Dalam mensosialisasikan wawasan kebangsaan di Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah daerah memiliki Instansi Teknis atau Organisasi Perangkat daerah (OPD) yang secara

khusus bertugas dalam hal-hal Kebangsaan dan Politik yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Priovinsi Sulawesi Utara. Program-program sosialisasi wawasan kebangsaan sudah di laksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara, namun masih dalam skala terbatas, Contohnya berdasarkan laporan bidang kebangsaan dan bina ideologi, wasbang dan karakter bangsa tahun 2019 telah di selenggarakan beberapa kegiatan sosialisasi di antaranya penguatan nilai-nilai kebangsaan yang pesertanya berjumlah 100 orang dengan menysasar peserta yaitu generasi muda dan siswa yang diselenggarakan di beberapa tempat, dan ada kurang lebih 7 kegiatan serupa yang di adakan, namun pada perhelatan Pemilihan Kepala daerah tahun 2020, lebih kencang lagi terjadi isu SARA seperti contoh : penggunaan kata “KOPIKO atau Kopiah Pilih Kopiah) hal-hal ini menandakan bahwa program-program sosialisasi wawasan kebangsaan yang di lakukan Oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara belum maksimal menghasilkan pemahaman yang benar tentang wawasan Kebangsaan.

Konsep Kinerja

Kinerja (*Job Performance*) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hasil kerja yang dapat di capai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi atau instansi sesuai dengan kemampuan dan tanggung jawab kerja yang diperlihatkan masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi atau instansi secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral ataupun etika. Konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari 2 segi, yaitu kinerja pegawai dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil perseorangan dalam suatu organisasi, Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisai. Kinerja pegawai dan kinerja organisasi memiliki keterkaitan yang sangat erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak bisa dilepaskan dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang dimiliki oleh organisasi yang digerakan atau dijalankan oleh pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku daam upaya dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. “Kinerja merupakan prestasi kerja atau

performance, yaitu hasil kerja selama periode tertentu dibanding dengan berbagai kemungkinan (Pasolong, 2010). Selanjutnya dikatakan bahwa “Kinerja adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai misinya” (Simamora 2014). Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa “Kinerja atau *performance* adalah berdaya guna prestasi atau hasil (Shadily 2012). Ada pendapat yang memberikan batasan pada konsep kinerja organisasi publik, setidaknya berkaitan dengan efisiensi, efektivitas, keadilan, dan daya tanggap (Wahyudi Kumorotomo 2016). Berdasarkan pengertian kinerja yang dipaparkan di atas, penulis menyimpulkan bahwa kinerja adalah suatu tingkat pencapaian dalam pelaksanaan kegiatan atau program yang memiliki tujuan untuk mewujudkan sasaran atau target yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi baik itu organisasi sektor publik atau organisasi sektor privat.

Konsep Pemerintah Daerah

Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal satu ayat dua mengatakan bahwa “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Konsep Wawasan Kebangsaan

“Paham kebangsaan bagi bangsa Indonesia merupakan suatu paham yang menyatukan berbagai suku bangsa dan berbagai keturunan bangsa asing dalam wadah Kesatuan Negara Indonesia. Dalam konsep ini berarti tujuan adalah formal yaitu kesatuan dalam arti kesatuan rakyat yang menjadi warga Negara Indonesia ber-Pancasila, maka nasionalisme Indonesia disebut juga dengan nasionalisme. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa wawasan berasal dari kata “mawas” yang berarti meneliti, meninjau, mengamati atau memandang.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengapa kinerja pemerintah daerah

dalam mensosialisasikan wawasan kebangsaan di Sulawesi Utara belum maksimal (studi kasus di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara).?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa kinerja pemerintah daerah dalam mensosialisasikan wawasan kebangsaan di Sulawesi Utara belum maksimal (studi kasus di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara).

Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang kinerja pemerintahan daerah.
2. Secara praktis diharapkan dapat dapat menjadi masukan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara, untuk meningkatkan kinerjanya dalam mensosialisasi program - program wawasan kebangsaan.
3. Bagi peneliti bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan berpikir melalui penulisan karya ilmiah juga menambah ilmu pengetahuan tentang kinerja pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi Utara, dimulai pada Desember 2020 dari proses penyusunan proposal, proses pembimbingan sampai pada penyajian dalam bentuk Thesis pada awal November 2021.

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran yang jelas tentang suatu fenomena atau kenyataan sosial yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, khususnya Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Mensosialisasikan

Wawasan Kebangsaan Di Sulawesi Utara. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti menjadi instrumen kunci yang berfungsi untuk mendapatkan fokus penelitian, memilih informasi dan mengumpulkan data secara gabungan, menganalisis data dan menafsirkan data serta membuat kesimpulan atas temuannya.(Sugiyono, 2012)

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari Kaban Kesbangpolda, Kepala Bidang Pembinaan Idiologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa. LSM 2 Orang (Brigade Manguni Indonesia dan Pemuda Pancasila), Pemerhati Sosial 2 Orang dan Anggota Masyarakat 12 Orang. Data sekunder diperoleh dari kepustakaan sebagai pendukung dalam penulisan tesis ini.

Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah mengapa “Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Mensosialisasikan Wawasan Kebangsaan Di Sulawesi Utara belum maksimal (Studi Kasus Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi Utara)” dengan mengacu pada konsep Kinerja Mahsun (2016) mengemukakan bahwa jenis indikator kinerja pemerintah daerah meliputi indikator : 1. Masukan : adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, Indikator ini dapat berupa dana, sumberdaya manusia, informasi, kebijakan, peraturan perundang - undangan dan sebagainya. 2. Proses (process), dalam indikator ini organisasi/instansi merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi keceatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Rambu yang paling dominan dalam proses adalah tingkat efisiensi dan ekonomis pelaksanaan, kegiatan organisasi atau instansi, Misalnya ketaatan pada peraturan perundangan”3. Keluaran: adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik. 4. Hasil : adalah segala sesuatu yang mencerminkan ke luaran kegiatan pada jangka menengah (Efek

langsung). 5. Manfaat : adalah segala sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan dan 6. Dampak : adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif terhadap setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data yaitu 1. Observasi, 2. Wawancara, 3. Studi kepustakaan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan tahapan “ Pengumpulan data, dilanjutkan dengan “Reduksi data, kemudian “Display data, selanjutnya “Verifikasi dan kesimpulan dimana simpulan akhir yang dibuat relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan temuan penelitian yang sudah di lakukan dalam pembahasan”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masukan

Masukan yang berhubungan dengan sosialisasi wawasan kebangsaan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Provinsi Sulawesi Utara, dilihat dari kinerjanya yang dianggap belum maksimal, karena pada tahun 2020 pihak kesbangpolda melakukan kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan hanya 3 kali dalam jangka waktu 1 tahun, padahal tahun tahun sebelumnya pihak kesbangpolda dapat melakukan sampai 20 kegiatan sosialisasi dalam tiap tahun. Namun turunnya kinerja ini ternyata karena dampak covid-19. Dalam hal ini, peneliti memberikan masukan agar pihak kesbangpolda Sulawesi Utara, memaksimalkan sosialisasi wawasan kebangsaan dengan lebih menekankan pada nilai - nilai pancasila sebagai ideologi bangsa dan berinovasi dalam mensosialisasikannya agar dapat menjangkau semua elemen masyarakat, teristimewa generasi muda yang merupakan generasi penerus, yang akan menjaga keutuhan dan kesatuan negara,

khususnya daerah Provinsi Sulawesi Utara. Dari hasil wawancara dengan beberapa anggota masyarakat diketahui beberapa hal yang dapat menjadi masukan bagi kesbangpol dalam mensosialisasikan wawasan kebangsaan, mereka mengatakan bahwa “Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara, dalam pelaksanaan sosialisasi wawasan kebangsaan sudah berjalan dengan baik, karena kami sendiri pernah menghadiri kegiatan - kegiatan tersebut, dan selalu berperan aktif dalam pelaksanaan sosialisasi wawasan kebangsaan ini, hal ini kami lakukan karena sadar sebagai warga Negara yang baik harus mengikuti dan juga terus mendorong apa yang menjadi program pemerintah, apalagi soal sosialisasi wawasan kebangsaan seperti ini, menunjukkan dan menyadarkan masyarakat untuk dapat memahami tentang pemahaman Pancasila sebagai dasar Negara. Kami melihat, dewasa ini sudah banyak masyarakat yang mulai meninggalkan pemahaman sebagai warga Negara yang baik, hal itu di karenakan banyak masyarakat yang terpengaruhi budaya luar, dan perlahan-lahan mulai meninggalkan jati diri mereka sebagai warga Negara yang baik. Dan disinilah kesbangpolda harus menyadarkan kembali masyarakat yang ada untuk dapat menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila lewat sosialisasi wawasan kebangsaan, seperti diskusi yang di lakukan di tengah masyarakat, dan juga dengan organisasi kemasyarakatan yang ada. Dalam hal ini upaya-upaya yang dilakukan oleh kesbangpol sendiri tentunya sudah baik dan bisa menjadi acuan dan landasan bagi masyarakat untuk tetap memperhatikan persoalan kebangsaan yang hari ini mulai hilang nilai-nilai kebangsaannya, karena oknum-oknum radikal yang ingin memecahkan keutuhan dan kesatuan Negara kita. Maka dari itu penting untuk badan kesatuan bangsa dan politik mensosialisasikan wawasan kebangsaan ditengah masyarakat yang ada. Kinerja dari kesbangpol dinilai oleh masyarakat sudah baik, karena beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh kesbangpol telah melibatkan seluruh elemen masyarakat yang ada.

Proses

Proses pelaksanaan sosialisasi wawasan kebangsaan sejauh ini berjalan dengan baik, namun setelah wabah covid-19 berdampak di daerah kita, pihak kesbangpolda mengalami masalah, dimana anggaran yang seharusnya di pakai untuk melaksanakan sosialisasi di geser untuk penanganan covid-19, hal ini tentunya berdampak pada program-program dari kesbangpolda yang seharusnya melaksanakan sosialisasi wawasan kebangsaan sebanyak 20 kegiatan, saat ini hanya dapat melaksanakan 3 kegiatan, itupun dilakukan secara daring (online) ini terbukti dari hasil wawancara dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara. Dalam wawancara tersebut peneliti menanyakan mengenai kebutuhan anggaran dan personil badan kesatuan bangsa dan politik provinsi Sulawesi Utara dalam menunjang kinerja kesbangpolda mensosialisasikan wawasan kebangsaan apakah sudah terpenuhi ? beliau mengatakan : “Secara prinsip tentunya sudah terlaksana dengan baik, tinggal bagaimana kita benar-benar mendukung kebijakan ini agar supaya bisa berjalan dengan baik. Seperti kegiatan wawasan kebangsaan, kegiatan penguatan ideology Pancasila, revolusi mental dan juga kegiatan bela Negara dan itu semua merupakan kegiatan prioritas dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mensosialisasikan kegiatan wawasan kebangsaan yang ada. Namun dalam pelaksanaan program, pihak kesbangpol tahun 2020 tidak banyak melakukan kegiatan, karena anggaran yang ada di pindahkan untuk penanganan covid-19, pihak kesbangpol hanya dapat melaksanakan kegiatan peningkatan kesadaran bela Negara , upacara peringatan hari lahirnya Pancasila ke 75, dan kegiatan focus group discussion peningkatan wawasan kebangsaan tahun 2020. Jawaban senada diperoleh dari Kepala Bidang Pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa saat menjawab beberapa pertanyaan peneliti yaitu; Apakah kebutuhan akan anggaran dan personil badan kesatuan bangsa dan politik Provinsi Sulawesi Utara dalam menunjang kinerja kesbangpol dalam mensosialisasikan wawasan kebangsaan sudah terpenuhi ? Apakah seluruh program yang di

rancangkan terkait dengan sosialisasi wawasan kebangsaan terlaksanakan ? Apakah yang menjadi tujuan dari di laksanakan program wawasan kebangsaan di sulawsi utara? Apakah tujuan yang di rancangkan berhasil ?, beliau mengatakan bahwa ‘‘Dalam proses mensosialisasikan wawasan kebangsaan yang di lakukan oleh badan kesatuan bangsa dan politik Provinsi Sulawesi utara pada tahun 2020, ada beberapa kegiatan yang tidak dapat berjalan dengan baik, karena pada tahun 2020 anggaran untuk bidang pembinaan ideology wawasan kebangsaan dan karakter bangsa di alihkan untuk penanganan covid-19, Pihak kesbangpolda dalam proses sosialisasi wawasan kebangsaan, selalu melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM dan juga generasi muda sehingga untuk mensosialisasikan tentunya harus ada perencanaan dan persiapan yang baik dan matang, dan hal itu membutuhkan anggaran untuk menunjang program ini, namun ketika wabah covid-19 melanda Provinsi Sulawesi Utara, otomatis anggaran untuk pelaksanaan ini berkurang, dan tentunya ada beberapa program yang tidak dapat dilaksanakan, ternyata proses sosialisasi wawasan kebangsaan yang dilakukan oleh kesbangpolda tidak berjalan sesuai dengan rencana yang telah di tetapkan sebelumnya, padahal sosialisasi wawasan kebangsaan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat yang ada, dalam menjalani kehidupan sebagai warga negara yang baik.

Hasil

Hasil dari sosialisasi wawasan kebangsaan yang di lakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat dari toleransi masyarakat yang tinggi, dan juga masyarakat mampu menjaga kesatuan dan keutuhan negara, khususnya di Daerah Provinsi Sulawesi Utara, mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan, guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai-nilai pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, juga bisa membawa masyarakat untuk dapat berpikir jernih dalam berbangsa dan bernegara dengan memahami nilai-nilai pancasila dan cinta tanah air, agar supaya kehidupan masyarakat yang ada tetap

terjaga keutuhan dan kesadaran sebagai warga negara yang baik dan benar. Hal ini dapat diketahui pada wawancara dengan LSM Pemuda Pancasila tentang usaha kesbangpol dalam melakukan sosialisasi wawasan kebangsaan yang ada pada LSM Pemuda Pancasila, dalam hal ini peneliti menanyakan tentang apa saja upaya dari kesbangpol dalam melakukan sosialisasi wawasan kebangsaan pada LSM khususnya Pemuda Pancasila ? ‘‘Pemuda pancasila selaku organisasi kepemudaan dalam melihat kinerja dan juga upaya dari kesbangpol dalam mensosialisasikan wawasan kebangsaan yang ada, tentunya melihat sosialisasi ini sudah berjalan dengan baik, namun beberapa tahun terakhir setelah covid-19 melanda daerah kita, kesbangpol sendiri hanya melaksanakan sosialisasi ini secara daring dan juga tidak rutin, seperti tahun- tahun sebelumnya, itu semua mungkin karena anggaran untuk pelaksanaan sosialisasi ini tergeser untuk penanganan covid-19. Sosialisasi tentang wawasan kebangsaan ini tentunya sangat dibutuhkan oleh para generasi muda sekarang, karena hal seperti ini yang bisa membangkitkan semangat pemuda untuk dapat menjaga kesatuan dan keutuhan Negara kita, khususnya di daerah Provinsi Sulawesi Utara, kami juga selalu mendukung kesbangpolda dalam melaksanakan kegiatan mereka, apalagi dalam mendorong masyarakat tentang pemahaman revolusi mental, pemahaman ideology Negara, dan juga sosialisasi wawasan kebangsaan yang ada. Upaya dari kesbangpol dalam sosialisasi wawasan kebangsaan tentunya juga membawa dampak yang baik dari pada pemuda, karena sosialisasi seperti ini yang dibutuhkan oleh para generasi muda yang ada sekarang, melihat perkembangan sekarang, para generasi muda yang ada, mulai kehilangan jati diri mereka sebagai generasi penerus bangsa, mungkin itu semua merupakan dampak dari moderenisasi yang mulai masuk di daerah kita, maka kesbangpolda sendiri, harus lebih berperan aktif dalam mensosialisasikan wawasan kebangsaan seperti ini pada generasi muda yang ada. Kesbangpolda sudah melaksanakan tugas mereka dengan baik terkait sosialisasi wawasan kebangsaan, namun sebagian besar generasi muda yang ada, memang sudah mulai apatis mengenai pemahaman bernegara yang baik dan juga mulai hilang

kesadaran mereka dalam pemahaman bernegara apalagi tentang wawasan kebangsaan yang ada” Walaupun tidak semua program sosialisasi wawasan kebangsaan terlaksana namun makna dari wawasan kebangsaan tetap tertanamkan dengan baik bagi masyarakat, karena tujuan dari sosialisasi ini untuk bisa memberikan pemahaman pada masyarakat agar dapat menjaga kesatuan dan keutuhan negara kita khususnya Provinsi Sulawesi Utara.

Manfaat

Manfaat dari sosialisasi wawasan kebangsaan tentunya untuk dapat membuka ruang berpikir, menambah pengetahuan dan pemahaman tentang bernegara yang baik, mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan nilai Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI agar dapat menjaga kesatuan dan keutuhan negara khususnya di daerah Provinsi Sulawesi Utara. Hal dapat dilihat dari terwujudnya kehidupan masyarakat yang rukun, solid, damai, dan harmonis.

Dampak

Dampak dari sosialisasi wawasan kebangsaan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara adalah untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat yang ada bahwa kesatuan dan keutuhan Negara khususnya di daerah Provinsi Sulawesi Utara harus tetap di jaga, tetap hidup sesuai dasar Negara kita yaitu Pancasila, menanamkan nilai nasionalisme pada generasi muda dan mampu mendorong masyarakat untuk bisa menerapkan nilai-nilai wawasan kebangsaan ini mulai dari nilai Pancasila sebagai dasar Negara dan juga dapat menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara. karena yang menjadi garda terdepan adalah masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari tanggapan LSM Brigade Manguni sebagai salah satu LSM yang ada di Provinsi Sulawesi, yang mengapresiasi kesbangpol dalam hal memberikan pemahaman tentang wawasan kebangsaan pada masyarakat di Provinsi Sulawesi dan menambahkan bahwa “ kami meyakini juga bahwa, semua LSM yang ada di Provinsi Sulawesi Utara akan mendukung

kesbangpol dalam hal mensosialisasikan wawasan kebangsaan yang ada di daerah kita, karena tujuannya untuk kebaikan kita sebagai masyarakat Provinsi Sulawesi Utara”.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Masukan yang berhubungan dengan sosialisasi wawasan kebangsaan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Provinsi Sulawesi Utara, tentunya dilihat dari kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi yang dianggap buruk, karena pada tahun 2020 pihak kesbangpolda sendiri hanya melakukan kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan hanya 3 kali dalam jangka waktu 1 tahun, padahal tahun tahun sebelumnya pihak kesbangpolda sendiri melakukan sampai 20 kegiatan sosialisasi dalam tiap tahun.

Proses Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara dalam mensosialisasikan wawasan kebangsaan tentunya memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, karena wawasan kebangsaan ini bertujuan untuk menjaga kesatuan dan keutuhan Negara kita khususnya daerah Provinsi Sulawesi Utara, dan tentunya nilai-nilai yang terkandung pada dasar negara kita adalah menjadi acuan atau dasar hidup kita sebagai masyarakat yang ada.

Hasil dari sosialisasi wawasan kebangsaan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara tentunya dapat dilihat dari toleransi masyarakat yang tinggi, dan juga masyarakat mampu menjaga kesatuan dan keutuhan negara kita khususnya di Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini juga tidak terlepas dari kerja keras dan kinerja kesbangpolda dalam pelaksanaan sosialisasi wawasan kebangsaan.

Manfaat dari sosialisasi wawasan kebangsaan tentunya untuk dapat membuka ruang berpikir masyarakat agar dapat menjaga kesatuan dan keutuhan negara khususnya di daerah Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini bisa lihat bahwa pentingnya sosialisasi wawasan kebangsaan di suatu daerah yang ada di Negara kita.

Dampak dari sosialisasi wawasan kebangsaan yang di lakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara tentunya mengingatkan kembali kepada masyarakat yang ada bahwa kesatuan dan keutuhan Negara khususnya di daerah Provinsi Sulawesi Utara harus tetap di jaga, karena yang menjadi garda terdepan adalah masyarakat sendiri.

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, berikut adalah masukan yang dapat diberikan : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara agar dapat berinovasi dalam pelaksanaan sosialisasi wawasan kebangsaan, karena jika tidak ada hal baru yang di terapkan dalam proses sosialisasi ini, maka masyarakat akan bosan dan nilai-nilai yang terkandung dalam wawasan kebangsaan ini, tidak akan tersampaikan kepada masyarakat yang ada di Provinsi Sulawesi Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Mahsun, Mohamad. 2016. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Penerbit : BPFY-Yogyakarta.
- Pasolong, Harbani. 2010. Teori Administrasi Publik. Alfabeta, Bandung.
- Simamora, 2014, Membuat Karyawan Lebih Produktif Dalam Jangka panjang (Manajemen SDM). Penerbit STIE YKPN, Yogyakarta.
- Shadily, Hasan, 2012, Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia, Penerbit : Rineka Cipta, Jakarta.
- Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Penerbit : Alfabeta. Bandung.
- Wahyudi Kumorotomo, 2016, Akuntabilitas Birokrasi Publik, Sketsa Pada Masa Transisi, Magister Administrasi Publik (MAP) Penerbit : Pustaka Pelajar, Yogyakarta.